DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.W. Widjaja, 1998, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta : PTRajaGrafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PTRajaGrafindo Persada.

H.J. Mukono, 2000, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Surabaya Airlangga University Press.

H.J. Mukono, 2003, *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan SaluranPernafasan*, Surabaya : Airlangga University Press.

Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : PT Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Ridwan HR., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Salim HS., 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi "Suatu Pengantar"*, Jakarta : CV Rajawali.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;

Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Keputusan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tim Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2015;

C. WEBSITE

Http://www.koran.padek.co/read/detail/39897, diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 10.37 wib.